



Forum

Multi Stakeholder Group (MSG)

Pelaksanaan Transparansi Pendapatan dari
Industri Ekstraktif Indonesia

8 Februari 2022

Agenda

Perkembangan Penyusunan Laporan EITI Indonesia 9

Rencana Kerja EITI Indonesia 2022



Perkembangan Penyusunan Laporan EITI Indonesia ke-9

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, KESDM selaku Ketua Harian Forum MSG

Tujuan dan Ruang Lingkup Pelaporan EITI Indonesia ke-9

Tujuan pelaporan

menampilkan data dan informasi dalam pengelolaan industri ekstraktif (2019-2020) pada setiap rantai pasok industri ekstraktif mulai produksi sampai dengan pemanfaatan pendapatan yang didapatkan sesuai dengan standar EITI Internasional 2019

Ruang Lingkup

Bab I

Latar Belakang, Tujuan Laporan Kontekstual, Ruang Lingkup, Metodologi Proses Pelaporan

Bab II

Perkembangan regulasi dan rezim fiskal pengelolaan industri ekstraktif di sektor Migas dan Minerba, dan informasi K/L terkait – [Req. 2.1](#)

Bab III

Kegiatan yang dilakukan industri ekstraktif, mencakup proses perizinan, eksplorasi, produksi, dan penjualan – [Req. 2.2 - 2.4; 3.1 - 3.3](#)

Bab IV

Komposisi dan realisasi penerimaan negara dari kegiatan industri ekstraktif, pajak dan non pajak, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah – [Req. 4.1 - 4.9; 5.1 - 5.3](#)

Bab V

Hubungan keuangan antara BUMN dan Pemerintah, peran BUMN dalam kegiatan sosial dan lingkungan, dan quasi fiskal – [Req. 2.6; 4.5; 6.2](#)

Bab VI

Pengeluaran dan program industri ekstraktif dalam kegiatan sosial (PPM) dan lingkungan (ASR, reklamasi, dan pengelolaan lingkungan) – [Req. 6.1 & 6.4](#)

Bab VII

Kontribusi industri ekstraktif terhadap ekonomi selama pandemic, tenaga kerja berdasar gender, dan kaitannya pada masyarakat adat – [Req. 6.3](#)

Bab VIII

Integrasi sistem teknologi informasi di K/L terkait, *contract disclosure* dan *beneficial ownership* – [Req. 2.5; 7.2-7.3](#)

Perbaikan Pelaporan EITI Indonesia ke-9

dari laporan periode sebelumnya dan kendala yang ada

Perbaikan

1. Perkembangan penyusunan regulasi di sektor Minerba paska Undang Undang Minerba No.3/2020
2. Transparansi metode perhitungan nilai ekspor migas
3. Quasi fiskal BUMN di sektor migas dan pertambangan
4. Informasi mitigasi risiko dan hambatan terkait keterbukaan kontrak
5. Data ketenagakerjaan berdasarkan gender
6. Keterkaitan dengan Masyarakat Adat

Kendala

1. Data ekspor impor Pertamina 2020 sudah tidak ditampilkan dalam website Pertamina
2. Pengeluaran PPM industri migas per kategori/program di 2020 tidak ditemukan lagi dalam laporan keberlanjutan SKK Migas.
3. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Minerba tahun 2020 di LKPP tidak dirinci per jenis usaha. Pada laporan EITI sebelumnya disediakan oleh Ditjen Pajak.
4. Disagregasi informasi data pajak per perusahaan oleh Pemerintah perlu mendapatkan persetujuan (waiver) dari perusahaan industri ekstraktif

Timeline Penyusunan Laporan EITI



Masukan MSG terhadap Laporan EITI ke 9

Badan Geologi

pada hal 155-156, yang berkaitan dengan Aplikasi Georima

DJ Minerba

Redaksional dan penyesuaian regulasi

SKK Migas

- Redaksional
- Pola penguasaan SDA di Indonesia
- Penyesuaian data dan regulasi
- Daftar Pengalihan PI 2019 dan 2020
- Dana ASR di perbankan

Kemenko Ekonomi

- Redaksional dan perbaikan penulisan (*typo*)
- Penyesuaian sumber data dan regulasi

BPMA

- Redaksional berdasarkan penyesuaian regulasi
- Wilayah kerja BPMA yang terminasi

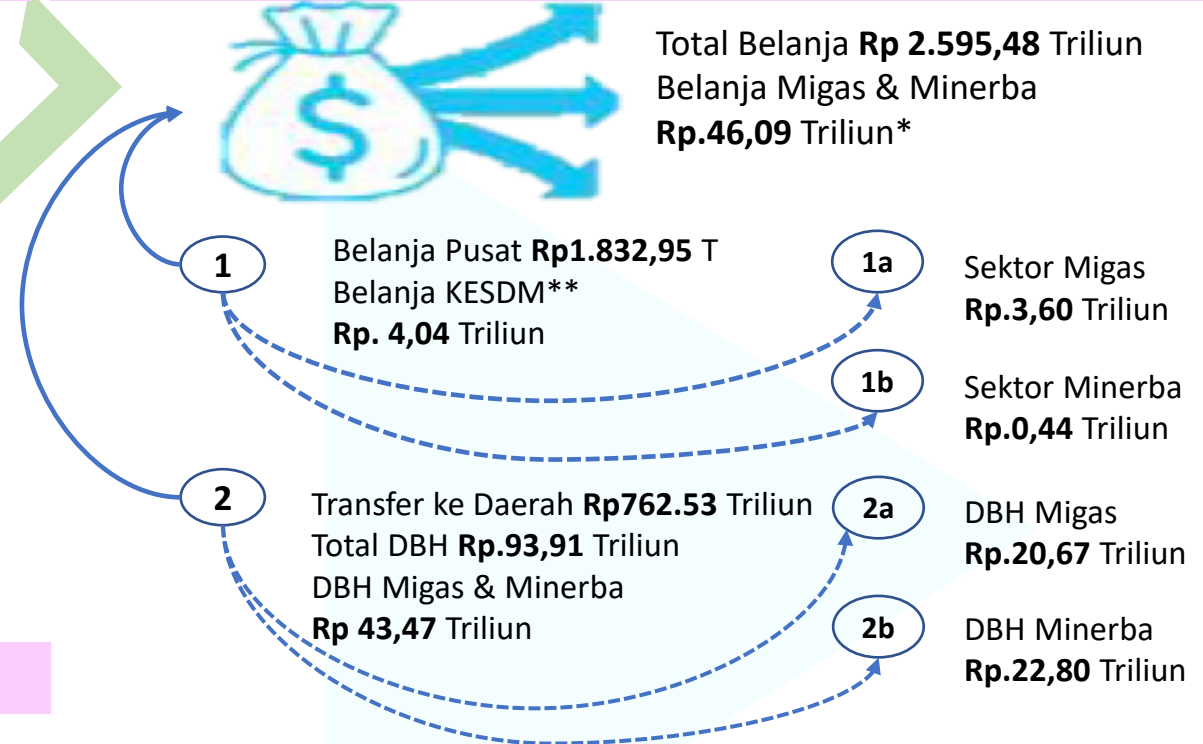
APBI

- Redaksional dan perbaikan penulisan
- Regulasi di sektor pertambangan
- Status kontrak PT KPC
- Prosentase DMO batubara
- Pro kontra regulasi PPM

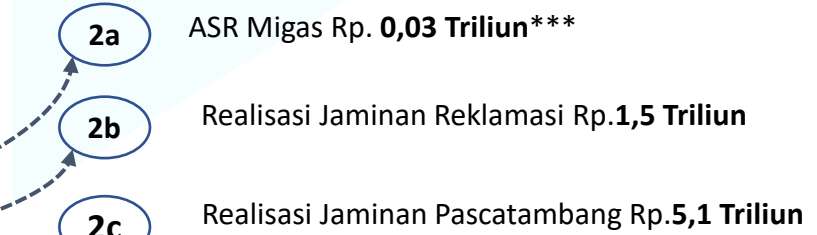
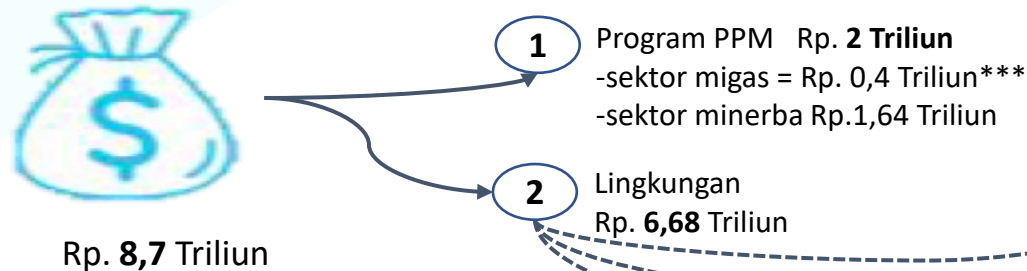
Revenue Flow Industri Ekstraktif 2020

Pendapatan Negara

Distribusi Pendapatan



Alokasi Dana PPM dan Lingkungan Perusahaan



*Sub Sektor Migas dan Minerba

** Belanja KESDM adalah Anggaran pada KESDM (Ditjen Migas, BPH migas, SKK Migas dan Ditjen Minerba)

*** 1USD\$=14.105 (JISDOR BI 30 Des 2020)

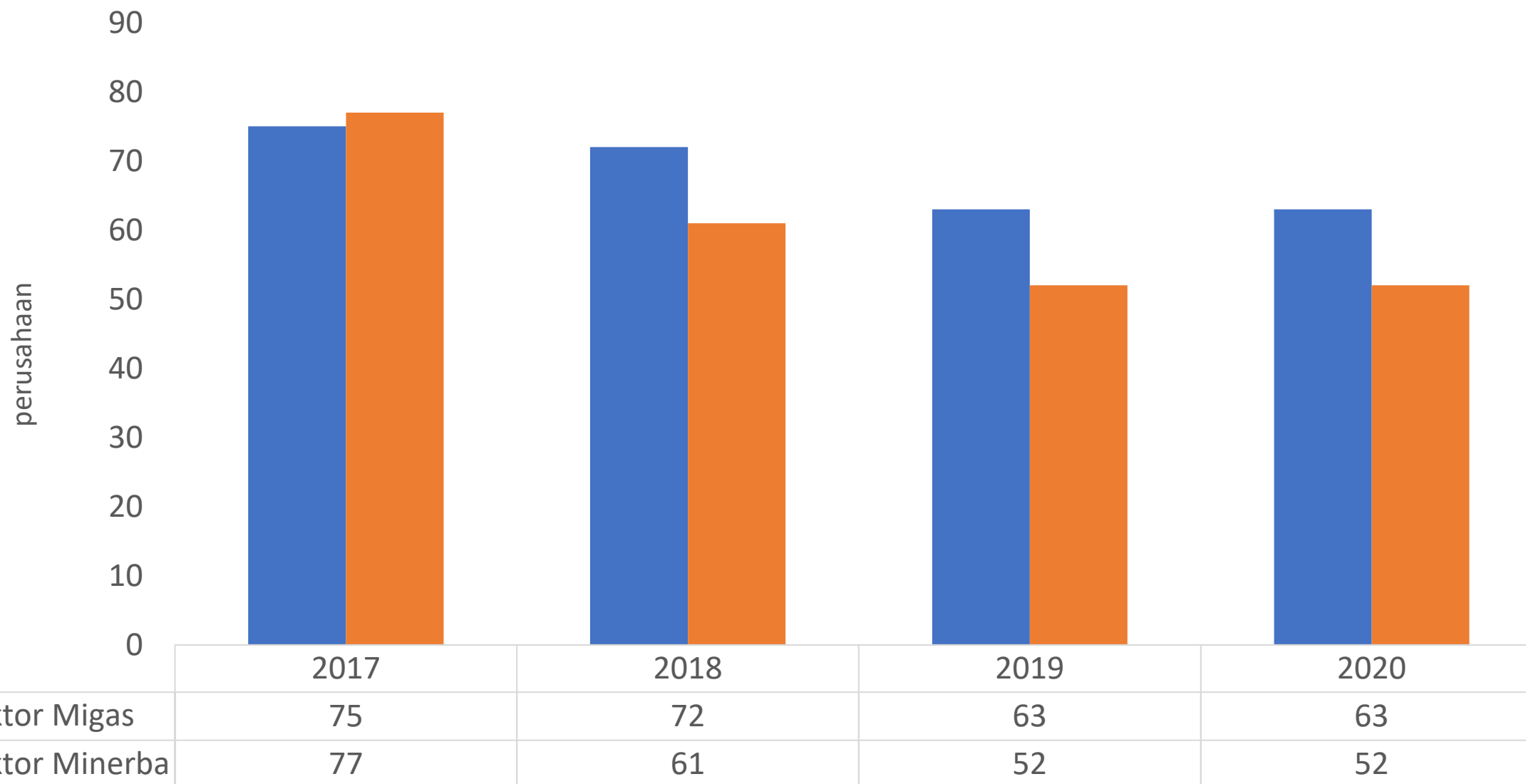
Kontribusi Sektor Industri Ekstraktif pada perekonomian nasional (pembentuk langsung PDB)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Kstan (2020)		Tahun 2020 terhadap Tahun 2019	Distribusi terhadap PDB Harga Berlaku
	2019	2020	2019	2020	YoY	%
Pertambangan dan Penggalian	1.149.913,5	993.541,9	806.206,2	790.475,2	-1,95	6,44
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	439.602,8	332.559,6	289.980,1	272.583,2	-6,00	2,15
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	368.890,5	283.194,7	259.598,5	245.498,6	-5,43	1,83
3 Pertambangan Bijih Logam	96.824,6	130.956,9	88.003,4	105.829,4	20,26	0,85
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	244.595,6	246.830,7	168.624,2	166.564,0	-1,22	1,60
PRODUK DOMESTIK BRUTO	15.832.535,4	15.434.151,8	10.949.037,8	10.722.442,7	-2,07	

Sumber: BPS

1. PDB sektor pertambangan dan penggalian di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,9 persen terhadap 2019
2. Kontribusi industri ekstraktif di dalam PDB nasional mencapai kurang dari 6,4 persen pada 2020

Jumlah Perusahaan yang Mengirimkan Kuesioner EITI



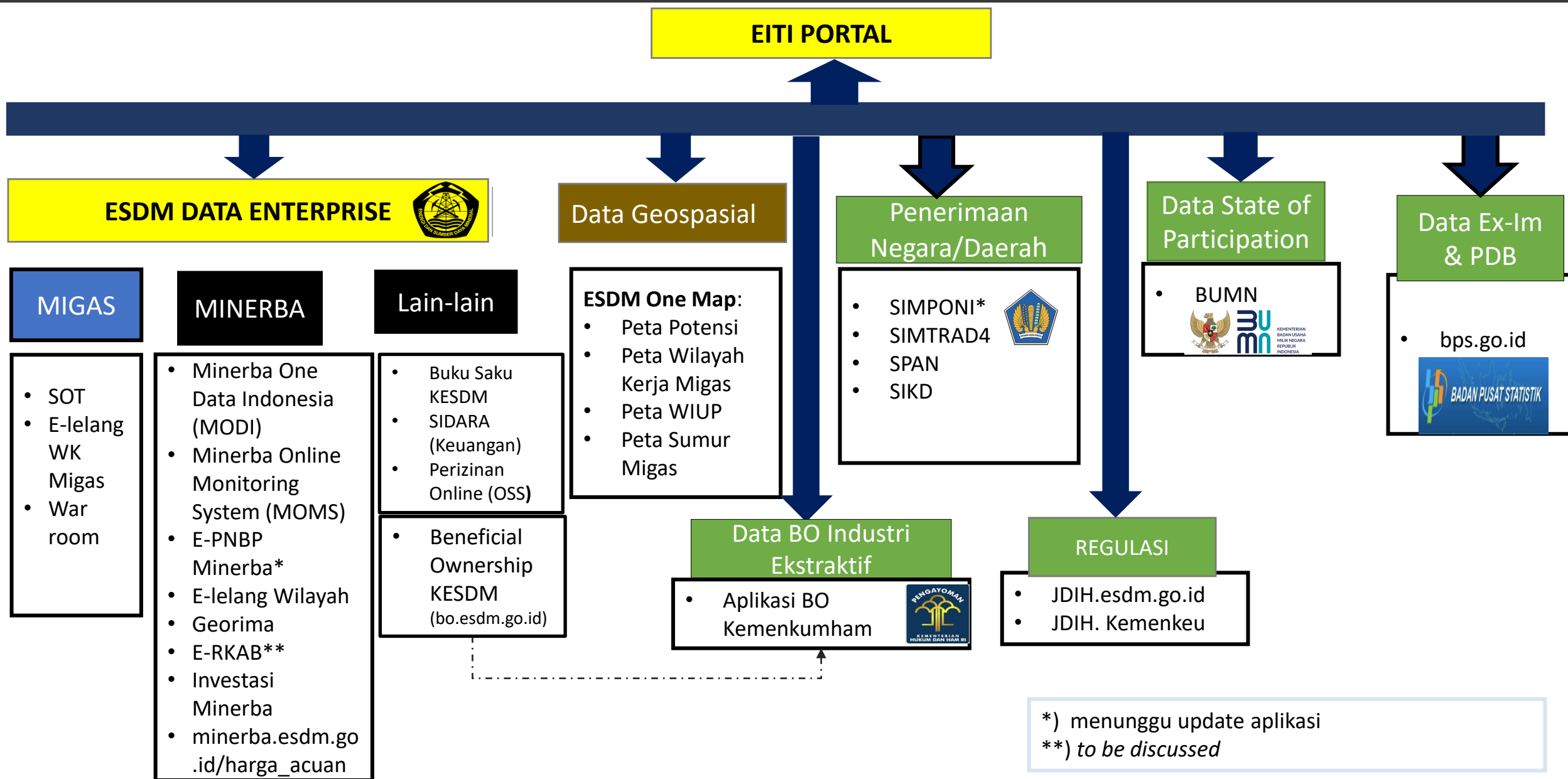
Rencana Kerja EITI Indonesia 2022

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM selaku Ketua Sekretariat EITI Indonesia

Struktur Portal – Data Industri Ekstraktif Indonesia



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



[illegible]

[illegible]

[illegible]



TERIMA KASIH



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Ruang Lingkup Laporan EITI ke 9

Bab/Requirement EITI	Ruang Lingkup
Bab I Pendahuluan	Latar Belakang, Tujuan Laporan Konstektual, Ruang Lingkup, Metodologi Proses Pelaporan
Bab II Gambaran Kegiatan Industri Ekstraktif dan Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif <i>(req. Legal Framework and Fiscal Regime)</i>	Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif menjelaskan mengenai kegiatan dari instansi yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Minyak dan Gas bumi (Migas) dan mineral dan batubara (Minerba), dan data Kementerian /Lembaga yang terkait
Bab III Implementasi Kegiatan Industri Ekstraktif <i>(req. License Allocation; License Registers; Ekploration; Production; Export;)</i>	Kegiatan yang dilakukan dalam industri ekstraktif sektor minyak dan gas bumi dan sektor mineral batubara. Mencakup proses perizinan dan kedua adalah kontribusi sektor industri ekstraktif.
Bab IV Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara <i>(req. Taxes and Revenues; Sale of the state's share of production or other revenues collected in kind; Transactions related to state-owned enterprises (SOEs); Subnational transfers)</i>	• Komposisi Realisasi Pendapatan Negara Penerimaan Perpajakan • Penerimaan Bukan Pajak • Alokasi Penerimaan Negara Dari Industri Ekstraktif • Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Pusat • Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Bab V Peran Badan Usaha Milik Negara <i>(req. State participation; Transactions related to state-owned enterprises (SOEs); Quasi-fiscal expenditures)</i>	• Hubungan Keuangan antara BUMN dan Pemerintah • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif • Holding BUMN • Quasi-fiscal Industri Ekstraktif

Ruang Lingkup Laporan EITI ke 9

Bab/Requirement EITI	Ruang Lingkup
Bab VI Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>(req Social and environmental expenditures ; Environmental impact)</i>	- Tanggung jawab sosial meliputi: program sosial melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, fasilitas sosial/umum (infrastruktur), dan lingkungan. - Tanggung jawab lingkungan meliputi: pengelolaan lingkungan, ASR, biaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan, penempatan jaminan reklamasi, realisasi jaminan reklamasi.
Bab VII Perkembangan Pemulihan Ekonomi Nasional <i>(req. Contribution to The Economy)</i>	- Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19 - Dampak Terhadap Masyarakat Adat - Tenaga Kerja Yang Mencakup Informasi Gender.
Bab VIII Kebijakan di Industri Ekstraktif <i>(req. Beneficial Ownership;Contract)</i>	- Perkembangan integrasi teknologi informasi - Kebijakan sesuai value chain - Disclosure contract - Beneficial ownership